

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH / LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LKPJ dan LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ dan LPPD ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Selatan,

**Ir. H. NAFARIN, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620513 198903 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>1</b>
1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	1
1.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan .....	2
1.2.1 Isu Strategis Organisasi .....	2
1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020.....	4
1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) .....	7
1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) .....	8
1.5 Capaian Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	8
1.6 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah .....	11
1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	23
1.8 Permasalahan dan Solusi .....	23-24
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (DEKONSENTRASI).....</b>	<b>27</b>
2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi.....	27
2.1.1 Target Kinerja dan Realisasi .....	27
2.2 Permasalahan dan Kendala.....	28
2.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	28
<b>BAB III URUSAN DESENTRALISASI.....</b>	<b>29</b>
3.1 Standar Pelayanan Minimal .....	29
3.2Alokasi Anggaran .....	29
3.3 Realisasi Anggaran .....	29
3.4 Dukungan Personil.....	30
3.5Permasalahan dan Solusi .....	32
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB V LAMPIRAN .....</b>	<b>36</b>

## BAB I

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 1.1 *Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan*

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program pembangunan yang terdiri dari 4 (empat) program rutin (kesekretariatan) dan 2 (dua) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
5. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

Dari program tersebut di atas, dijabarkan menjadi kegiatan. Adapun kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - f. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - g. Penataan Perpustakaan
  - h. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan
  - i. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
  - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan
  - k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan dan Peleporan Kinerja SKPD
  - b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - c. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Dan Aset SKPD
4. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
  - b. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
  - c. Penyelenggaraan Pameran Investasi
  - d. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi
  - e. Forum Investasi Kalimantan Selatan
  - f. Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah
6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:
  - a. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan
  - b. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan
  - c. Pelayanan Penanaman Modal.

## **1.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan**

### **1.2.1 Isu Strategis Organisasi**

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014) dan 3,84% (2015)
2. Investasi di kalsel, s.d. tahun 2014 masih relative menarik, terutama di sektor tambang
3. Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik

2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui:

- a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
- b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
- c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
- d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Dari permasalahan tersebut, melalui Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Belum teridentifikasinya data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Pelayanan belum optimal;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. Kurangnya sarana dan prasarana;
11. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan dan akuntabilitasnya dapat lebih dijamin;
12. Keterbatasan Anggaran.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

## **1.2. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020**

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

**“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera,  
Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 adalah :

### **Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 :**

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
- b. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
- c. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
- d. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; Dan

- e. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

### **Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

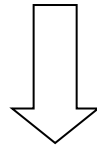
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2021, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



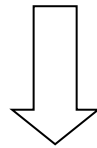
## **Misi 5**

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan



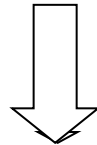
## **Tujuan**

Meningkatkan daya saing Perekonomian



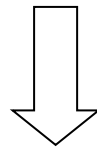
## **Sasaran**

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan, dan Jasa serta Meningkatnya Investasi dalam Aktifitas Perekonomian



## **Strategi**

Pengembangan Investasi baik Usaha Industri Kecil Maupun Besar



## **Indikator**

- Realisasi Investasi PMA dan PMDN
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 1.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) terdiri dari :

Nomor	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
<b>Urusan Penanaman Modal</b>				
1	Perda mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	- Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Fasilitas Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan  - Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah		Secara khusus pada tahun anggaran 2021 telah direncanakan pada kegiatan di DPMPSTSP Prov.Kalsel terkait pemberian fasilitas / intensif penanaman modal, dimana pada kegiatan tersebut akan merumuskan kebijakan penanaman modal sesuai amanat PP
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal			
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal			
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Terlaksananya forum, seminar, <i>one-one meeting</i> .	8 kali	Daftar kegiatan terlampir
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya pameran secara online	1 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Promosi Investasi dan Fasilitas Perusahaan	1 Kali	Pendampingan Investor bersama BKPM RI (Sydney)
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	36 Kali	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Penerbitan Perizinan dan Non perizinan	Senilai Rp 14,86 T dengan jumlah 19,356 Perusahaan	Data terlampir

9	Laporan realisasi penanaman modal	Nilai Realisasi investasi	7,7 T	Data terlampir
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten / kota	Terlaksananya Rakor investasi dengan DPMPTSP kab/kota	1 Kali	Data terlampir
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya Pembinaan penanaman modal PMA dan	PMDN 4 kali secara online dan 2 kali secara tatap muka. Sebanyak 60 perusahaan	Bukti / Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi perikanan dan non perikanan provinsi	Tersedia pada website, brosur	2 media	Bukti terlampir

#### 1.4 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :

Nomor	IKK OUTCOME	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Realisasi Investasi 2019 sebesar Rp15. Realisasi Investasi 2020 sebesar Rp 7,7 T	-50,45%	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2019 dan 2020 pada Triwulan IV ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

#### 1.5 Capaian Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2020 yakni **peningkatan investasi**. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp12 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat B (nilai 85) serta indikator tambahan berupa nilai persetujuan investasi (rencana investasi) sebesar Rp14.8 triliun. Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut :

## Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2019, 2020

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	10.500.000.000.000	15.654.500.000.000 (149,06%)	12.000.000.000.000	7.756.307.320.000 (64,67%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (82,50)	B (86,79)	B (85)	B (88,35)
3	Nilai Persetujuan Investasi	11.700.00.000.000	18.681.095.726.403 (159,67%)	12.900.000.000.000	14.857.902.199.32 7 (115,18%)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 3 (tiga) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2020, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *output* yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN ditargetkan sebesar **12 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sebesar **7,7 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **64,67%**.

Pada indikator Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi ditargetkan sebesar **12,9 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sebesar **14,8 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **115,18%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan **B dengan nilai 85**. Adapun realisasinya adalah **B dengan nilai 88,35**, sehingga kinerja mencapai **103,95%**.

Indikator DPMPTSP (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 10,5 triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar 5,8 triliun rupiah atau 48,33%. Realisasi investasi telah mencapai target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan investasi:

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi
6. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
7. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
8. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)
9. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat dan prosedur)

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 132 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan

teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission (OSS)*
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015.

## **1.6 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah**

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	Rp12.000.000.000.000	Rp 7.756.307.320.000
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85)	A 35
2	Sekretaris	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B (77,50)	A (84,05)
			Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP	0,05	0,19
		Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	80%	80%
		Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	100,00%	101,33 %
			Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	90%	100%
		Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Aset yang tercatat	100%	100%
			Persentase penyerapan anggaran	90%	98,10%

			SOPD		
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Menyusun data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	75 Orang	79 Orang
		Melaksanakan peningkatan kapasitas SOPD	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham	8 Orang	8 orang
4	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94
			Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,1
			Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen
		Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SOPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen
		Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi	Jumlah aset yang dikelola	1 Set	1 Set



		perkantoran			
5	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembang an Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kerjasama Pemberdayaa n Dunia Usaha	2 Kerjasama	2 Kerjasama
			Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	13 Potensi	13 Potensi
6	Kasi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase kesesuaian RUPM dengan sektor Investasi	100 ,00% ( 8 Sektor )	100 ,00% ( 8 Sektor )
7	Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan Penanaman Modal	Jumlah Kemitraaan Dunia Usaha	2 Kemitraan	3 Kemitraan
8	Kabid Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Rencana Investasi	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	Rp12.900.000.000.000	Rp14.857.902.199.327
9	Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Identifikasi Promosi Investasi	Jumlah Calon Investor yang berminat investasi	4 Investor	4 Investor
			Jumlah item Media Promosi	6 Item	6 Item
10	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Pelaksanaan Promosi Investasi	Jumlah Promosi jenis potensi investasi	5 Potensi	8 Potensi

	Penanaman Modal		daerah yang diminati		
			Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	5 Kali	9 Kali
11	Kabid Pengendalian Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	50,00%	100%
			Persentase Perusahaan yang aktif dalam Investasinya	24,00%	25,76%
12	Kasi Pemantauan Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	312 Perusahaan
13	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	400 Perusahaan	419 Perusahaan
14	Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	B (85)	B (87,88)
			Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang	100,00%	100%

			Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP		
15	Kasi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alama	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani	40 Jenis Izin	40 Jenis Izin
16	Kasi Perizinan Ekonomi	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100,00%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Ekonomi yang dilayani	50 Jenis Izin	50 Jenis Izin

17	Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	(85) B	89,84 (A)
			Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP	100,00%	100,00%
18	Kasi Perizinan Sosial	Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100,00%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani	20 Jenis Izin	20 Jenis Izin
19	Kasi Perizinan Infrastruktur	Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Nonperizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses sesuai Standar Pelayanan	100,00%	100,00%

			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Infrastruktur yang dilayani	35 Jenis Izin	35 Jenis Izin
20	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan informasi	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM Penanganan (pelayanan) Pengaduan	85 (B)	91,25 (A)
			Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	100,00%	100,00%
21	Kasi Kebijakan, Hukum dan Layanan	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan diselesaikan	100,00%	100,00%
22	Kasi Data dan Informasi	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Updating Sistem Informasi Investasi serta Perizinan dan Nonperizinan	100,00% (12 Bulan)	100,00% (12 Bulan)

Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2019, DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

**I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)**

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020 sebesar 98,10% dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan :
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan kegiatan:
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
  - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
- Penyusunan indek kepuasan masyarakat dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 2 dokumen IKM
  - Penyusunan dan pelaporan kinerja SKPD realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 5 dokumen perencanaan dan pelaporan.
  - Penyusunan dan pelaporan keuangan dan aset SKPD realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun

## II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

### 1. Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp549.261.050,- dan terealisasi sebesar Rp541.001.050,- atau 94,76% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp264.688.250.00. Serapan keuangan sebesar Rp264.688.250 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:
  - a. Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
  - b. Terpasangnya baliho promosi investasi di 2 media promosi, berlokasi di Jakarta dan bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
  - c. Mengikuti pelaksanaan Promosi Investasi, yaitu:
    - 1) Zoom Meeting Koordinasi Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Investasi oleh IIPC Sydney bersama DPMPTSP Kalsel tanggal 27 Juli 2020
    - 2) Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x PT PII x IIPC Sydney tanggal 24 September 2020
    - 3) Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x PT PII x IIPC Sydney tanggal 6 Oktober 2020
    - 4) Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Selatan (Industri Smelter Kotabaru) di Novotel Banjarmasin Airport 26 Oktober 2020
    - 5) Rapat Koordinasi & Zoom Meeting Penyusunan Peta Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Selatan (Industri Smelter Tanah Bumbu) di Novotel Banjarmasin Airport tanggal 27 Oktober 2020
    - 6) Zoom Meeting DPMPTSP Banjarmasin x IIPC Sydney Pembahasan Minat Investasi pada Proyek Kusan Dam di Kalimantan Selatan tanggal 05 Nopember 2020
    - 7) Zoom Meeting Capacity Building Fungsi Hubungan Investor tanggal 10 November 2020
    - 8) Zoom Meeting DPMPTSP Prov Kalsel x PT Sucofindo Persero FGD Dengan Stakelohder Terkait Untuk Kebutuhan Penyusunan Peta Peluang Investasi Di Sektor Industri Smelter Tanah Bumbu tanggal 26 November 2020

9) Virtual Meeting Indonesia Infrastruktur Week 2020 tanggal 1-3 Desember 2020

- Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp26.610.200,00. Serapan keuangan sebesar Rp26.610.200,00 atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah:

  - a. Terjalannya kemitraan dengan Borneo Trip
  - b. Terjalannya kemitraan dengan Bakul Emak
  - c. Terjalannya kemitraan dengan Banuabisa.com
- Kegiatan Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp51.374.400.00 Serapan keuangan sebesar Rp51.374.400.00 atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:kesuaian RUPM dengan sektor investasi dengan 8 sektor investasi
- Kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp62.913.400 Serapan keuangan sebesar Rp54.653.400 atau 86.87% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2019 bertempat di Hotel Aston - Batam pada tanggal 11 Juli 2019 yang dihadiri oleh 100 peserta terdiri dari:

  1. Tersedianya 1 orang Tenaga Kontrak Pengelolaan Pemetaan Sumber Daya Investasi yang difasilitasi Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
  2. Tersedianya media promosi : Brousur, Informasi potensi diwebsite, baliho, Buku, Video, Roll Banner
- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp80.867.900,00. Serapan keuangan sebesar Rp80.867.900,00 atau 100.00% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp62.806.900,00. Serapan keuangan sebesar Rp62.806.900,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

  1. Tersedianya 1 orang Tenaga Kontrak yang difasilitasi Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun



## **2. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp366.903.100,- dan terealisasi sebesar Rp366.903.100,- atau 100,00% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan Rapat dengan Instansi terkait dan Sosialisasi Perizinan  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar 117.828.200,00. Serapan keuangan sebesar Rp117.828.200,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:
  - a. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, atau konsolidasi perizinan.
  - b. Tersedianya 1 orang Tenaga Kontrak yang difasilitasi Jaminan Sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun
- Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp144.791.200,00. Serapan keuangan sebesar Rp144.791.200,00 atau 100.00% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta perizinan bidang Infrastruktur dan sosial.
- Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp104.263.700,00 Serapan keuangan sebesar Rp104.263.700,00 atau 100,00% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah:
  - a. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Selatan bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

### **1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 07 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019,

adapun rekomendasi untuk urusan Penanaman Modal (Investasi) sebagai berikut :

1. Penguatan Investasi, pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
2. Memaksimalkan Promosi Investasi, membuka akses terkait komoditas-komoditas unggulan Kalimantan Selatan

## 1.8 Permasalahan dan Solusi

Pada triwulan ke III Tahun 2020 ( Juli – September 2020) terdiri dari PMDN sebesar Rp. 732,752.900.000.000,- (±Rp 732,7 Milyar) dan PMA :Rp 602,779.680.000.000,- (±Rp 602,859 Milyar). Total Realisasi Investasi Triwulan III : Rp 1.335,532.580.000,- (±Rp 1,3 Trilyun).

Sedangkan sampai dengan Triwulan III tahun 2020 (januari – September 2020) PMDN : Rp. 2.818,500.000.000,- (±Rp 2,8 Trilyun) dan PMA : Rp 2,976.480.000.000,- (±Rp 2,9 Trilyun).

Pada Triwulan IV tahun 2020 (September – Desember 2020) Sebesar Rp1.959.303.860.000 (1,9 Trilyun).

Total Realisasi Investasi s.d. Triwulan IV : Rp 7.756.307.320.000,- (±Rp 7,7 Trilyun).

Pencapaian Realisasi Investasi hanya 64,67%.

Target Realisasi Investasi Tahun 2020 di Kalimantan Selatan menurut RPJMD (Renstra DPMPTSP) adalah sebesar Rp 12 Trilyun.

Total Realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) Tahun 2020 di Kalimantan Selatan sebesar **7,7 T**, menurun dibandingkan periode yang sama Tahun 2019 sebesar Rp 15,7 Trilyun.

Namun dari sisi jumlah proyek, total jumlah proyek sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 (Januari –Desember 2020) di Kalimantan Selatan sebanyak 1.956 perusahaan jauh meningkat dbandingkan periode yang sama Tahun 2019 yang hanya sebanyak 896 perusahaan, dimana kesadaran perusahaan PMA/PMDN sudah membaik sesuai Perka BKPM No. 7 Tahun 2018 namun karena **pertumbuhan perekonomian mengalami kontraksi akibat wabah covid 19 sehingga realisasi investasi tidak tercapai secara optimal.**

Dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan :

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.

5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelahitan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

**Permasalahan :**

1. Anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pemantauan dan pembinaan serta pengawasan ke lokasi perusahaan yg dipotong menyebabkan tidak optimalnya kinerja.
2. Kondisi perekonomian baik Indonesia maupun global yang mengalami pertumbuhan negatif atau resesi ekonomi berdampak kepada kinerja investasi ataupun realisasi investasi dari Perusahaan.
3. Untuk cabang perusahaan, penanganan atau yg mengisi LKPM perusahaan adalah pegawai dari Kantor Pusat sehingga menyulitkan

koordinasi antara personil DPMPTSP dengan petugas dari Kantor Pusat perusahaan tersebut.

4. Belum ada sanksi/hukuman bagi Perusahaan yang tidak mentaati kewajiban menyampaikan LKPM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kurang maksimalnya kabupaten / kota dalam usaha pencapaian target realisasi investasi sesuai target investasi daerah masing-masing, masih bergantung kepada Provinsi Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan LKPM

- Proyeksi Ekonomi

Ekonomi Indonesia terancam tidak bisa pulih cepat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan keluaran Oktober memproyeksikan pertumbuhannya sepanjang 2020 masih minus 1,5% secara tahunan. Ini lebih dalam dari proyeksi Juni lalu yang tumbuh minus 0,3%. Revisi proyeksi ke arah lebih buruk juga dilakukan Bank Dunia dalam laporan keluaran bulan yang sama. Angkanya antara -1,6% sampai -2%. Padahal, Juli lalu lembaga ini masih memproyeksikan ekonomi negeri ini tumbuh positif 0%. Kedua lembaga tersebut meramal ekonomi Tanah Air akan pulih pada 2021. IMF memproyeksikan sepanjang tahun depan ekonomi tumbuh 6,1%. Sementara Bank Dunia meramalnya akan tumbuh antara 3% sampai 4,4%. Proyeksi tak jauh beda datang dari Office of Chief Economist Group (OCE) Bank Mandiri. Lembaga ini memproyeksikan secara kuartalan (qtoq) ekonomi akan tumbuh melambat pada kuartal III dan IV tahun ini, meskipun lebih baik dari triwulan kedua yang berkontraksi 5,32%. Perkiraan pembalikan ke level pra-Covid-19 pada kuartal II 2021 dengan pertumbuhan 5,15%.

**Solusi :**

1. Mengoptimalkan sosialisasi atau bimtek LKPM secara on- line maupun off-line terhadap perusahaan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota.
2. Mengoptimalkan koordinasi baik secara off line ataupun online terhadap perusahaan terutama yg laporannya ditangani oleh kantor pusat dengan meminta bantuan melalui staf/pejabat Direktorat Wilayah II Deputi Dalak BKPM.

2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pejabat di DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk bisa lebih baik dalam mengejar target realisasi investasi melalui penyampaian LKPM perusahaan di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Memantau LKPM perusahaan yang dikoreksi atau dikembalikan oleh BKPM untuk segera diperbaiki dan disampaikan ulang sampai disetujui menjadi realisasi investasi oleh BKPM.
4. Untuk Triwulan 4 Tahun 2020, melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menunjuk PIC masing-masing Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengejar perusahaan yang belum pernah menyampaikan LKPM dan mengingatkan perusahaan yang sudah menyampaikan LKPM agar menyampaikan lagi pada triwulan 4, dimana periode pelaporan LKPM nya dimulai pada tanggal 1 – 10 Januari 2021.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI

#### 2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

##### 2.1.1 Target Kinerja dan Realisasi

###### Dekonsentrasi yang diterima

1. Dasar Hukum  
DPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)  
Nomor 065.01.159002/2018
2. Instansi Dekonsentrasi  
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
3. Program dan Kegiatan  
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, Kegiatan  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2020 adalah sebesar  
Rp192.898.900,00 atau 93,27 persen dari anggaran belanja sebesar  
Rp206.809.000,00 . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA  
2018 adalah sebagai berikut:

###### Target Belanja Tahun Anggaran 2020

URAIAN	2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	206.809.000	192.898.900	93,27 %
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>206.809.000</b>	<b>192.898.900</b>	<b>93,27 %</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	206.809.000	192.898.900	93,27 %

## **2.2 Permasalahan dan Kendala**

Realisasi investasi tahun 2020 tidak tercapai dikarenakan :

1. Adanya pandemi covid yang melanda diseluruh dunia dan dengan diberlakukannya PSBB untuk meminimalisir penyebaran virus corona yang terus melonjak di indonesia mengakibatkan daya beli masyarakat dan permintaan konsumen melemah. Sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia yang mengalami penurunan sebesar minus 4,23% selama kuartal III 2020.
2. Kondisi perekonomian pada tahun 2020 juga memberikan ketidakpastian yang besar bagi investasi karena hampir semua negara di dunia mengalami resesi sebagai akibat pandemi covid serta menyusutnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal Asing (PMA) secara global tercatat turun 30%-40%.

## **2.3 Saran dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjutnya

1. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan dan investasi serta memangkas birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai suatu investasi.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan perusahaan asing dan domestik yang telah ditandatangani pada tanggal 18 januari 2021. Sesuai dengan amanat Undang-undang Cipta kerja bahwa setiap pemerintah daerah atau pusat dengan kewenangan wajib memfasilitasi UMKM dan usaha besar kecil mikro dalam rantai pasok produksi. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dengan harapan dapat membantu UMKM untuk berkembang dan bertumbuh skalanya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perekonomian indonesia.

## BAB III

### URUSAN DESENTRALISASI

#### 3.1 Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### 3.2 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp.7,138,625,000 (60,66%) dan Belanja Langsung (BL) untuk pelaksanaan program kegiatan sebesar Rp4.629.876.950 (39,34%). Adapun realisasi anggaran sebesar 98,10% BL dan 9514% BTL. Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 100,00%.

#### 3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Realisasi Keu	Realisasi Fisik	Satuan unit
	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 2.496.206.000</b>	<b>Rp 2.432.857.866</b>	<b>Rp 63.348.134</b>	<b>97,46%</b>	<b>100,00%</b>	
2.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 490.355.000	Rp 458.622.066	Rp 31.732.934	93,53%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 70.800.000	Rp 65.993.000	Rp 4.807.000	93,21%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 23.000.000	Rp 22.998.500	Rp 1.500	99,99%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an	Rp 73.000.000	Rp 71.940.000	Rp 1.060.000	98,55%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 290.000.000	Rp 271.546.500	Rp 18.453.500	93,64%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 239.750.000	Rp 232.625.500	Rp 7.124.500	97,03%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.27	Penataan Perpustakaan	Rp 66.856.000	Rp 66.805.000	Rp 51.000	99,92%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.34	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Rp 333.945.000	Rp 333.945.000	Rp -	100,00%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.61	Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor	Rp 240.000.000	Rp 239.988.400	Rp 11.600	100,00%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.79	Penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan	Rp 93.500.000	Rp 93.433.000	Rp 67.000	99,93%	100,00%	12 Bulan
2.10.01.82	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Rp 575.000.000	Rp 574.960.900	Rp 39.100	99,99%	100,00%	12 Bulan
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Rp 1.006.477.000</b>	<b>Rp 993.729.500</b>	<b>Rp 12.747.500</b>	<b>98,73%</b>		
2.10.02.15	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung	Rp 638.603.000	Rp 636.379.000	Rp 2.224.000	99,65%	100,00%	12 Bulan



	Kantor						
2.10.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 220.000.000	Rp 212.931.400	Rp 7.068.600	96,79%	100,00%	12 Bulan
2.10.02.68	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 42.874.000	Rp 39.600.000	Rp 3.274.000	92,36%	100,00%	2 SET
2,10,02,97	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Rp 105.000.000	Rp 104.819.100	Rp 180.900	99,83%	100,00%	12 Bulan
	Program pengembangan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 204.681.000	Rp 201.117.700	Rp 3.563.300	98,26%		
2.10.06.100	Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Rp 144.981.000	Rp 142.066.300	Rp 2.914.700	97,99%	100,00%	5 Dokumen
2.10.06.74	Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	Rp 49.850.000	Rp 49.210.000	Rp 640.000	98,72%	100,00%	2 Dokumen
2.10.06.98	Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan aset SKPD	Rp 9.850.000	Rp 9.841.400	Rp 8.600	99,91%	100,00%	1 Dokumen
	Program peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur	Rp 6.348.800	Rp 6.348.800	Rp -	100,00%		
2.10.08,03	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 6.348.800	Rp 6.348.800	Rp -	100,00%	100,00%	1 Orang
	Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi investasi	Rp 549.261.050	Rp 541.001.050	Rp 8.260.000	98,50%		
2.10.16.15	Pengelolaan sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Rp 62.806.900	Rp 62.806.900	Rp -	100,00%	100,00%	12 Bulan
2.10.16.16	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Rp 26.610.200	Rp 26.610.200	Rp -	100,00%	100,00%	3 Kemitraan
2.10.16.17	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 264.688.250	Rp 264.688.250	Rp -	100,00%	100,00%	5 Kali
2.10.16.18	Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi	Rp 51.374.400	Rp 51.374.400	Rp -	100,00%	100,00%	1 Dokumen 1 Dokumen
2.10.16.19	Forum Investasi Kawasan Kalsel	Rp 62.913.400	Rp 54.653.400	Rp 8.260.000	86,87%	100,00%	1 Kegiatan
2.10.16.20	Pengendalian pelaksanaan Investasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian masalah	Rp 80.867.900	Rp 80.867.900	Rp -	100,00%	100,00%	419 Perusahaan
	Program Peningkatan Kualitas dan kemudahan Pelayanan perizinan	Rp 366.903.100	Rp 366.903.100	Rp -	100,00%		
2.10.19.03	Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dan Sosialisasi Perizinan	Rp 117.828.200	Rp 117.828.200	Rp -	100,00%	100,00%	1 Kali
2.10.19.10	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	Rp 144.791.200	Rp 144.791.200	Rp -	100,00%	100,00%	12 Bulan
2.10.19.13	Pelayanan Penanaman Modal	Rp 104.283.700	Rp 104.283.700	Rp -	100,00%	100,00%	1 Kali
	Jumlah	Rp 4.629.876.950	Rp 4.541.958.016	Rp 87.918.934	98,10%	100%	

### 3.4 Dukungan Personil

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di table.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	2	9	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	0	1	1	
7	Diploma Empat (D-IV)	-	-	0	
8	Sarjana (S-1)	10	8	18	
9	Sarjana (S-2)	11	4	15	
10	Sarjana (S-3)	1	-	1	
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	-	7	*)
2	Sarjana (S-1)	13	9	22	*)
	<b>Jumlah Non PNS</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	
	<b>Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP</b>	<b>56</b>	<b>23</b>	<b>79</b>	

Keterangan : \*) Pegawai Tenaga Kontrak

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	1	0	1	
4	II/d Pengatur Tk.I	4	1	5	
5	III/a Penata Muda	2	2	4	
6	III/b Penata Muda Tk.I	6	3	9	

7	III/c Penata	3	5	8	
8	III/d Penata Tk.I	6	3	9	
9	IV/a Pembina	1	1	2	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	6	1	6
4	Eselon IV.A	8	3	11
5	Fungsional Tertentu	2	1	3
6	Non Struktural / Fungsional Umum	12	10	22
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>

### 3.5 Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

Secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam penanganan pelayanan.
- b. Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.
- d. SOP dan Flowchart dari SKPD yang melimpahkan wewenangnya, belum semuanya ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan karena terkendala adanya Peraturan Kementerian/Lembaga masing-masing SKPD.
- e. Tim Teknis tidak berada dalam satu tempat sehingga pihak PTSP harus menyampaikan kembali untu permintaan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan permohonan izin tertentu.
- f. Jaringan internet kurang optimal sehingga proses perizinan yang dilakukan secara online tidak sesuai dengan ketentuan SOP.
- g. Untuk perizinan disektor perikanan (izin kapal) dan disektor perhubungan (izin perpanjangan trayek yang menjadi kewenangan) proses perizinan sudah dilakukan secara online, maka bagi pemohon minimal harus mempunyai HP android agar dapat mengaksesnya.

## **2. Solusi**

- a. Melengkapi beberapa permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun didaerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
- b. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.
- c. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- d. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKPJ LPPD DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran strategik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran strategik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2020 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2020. Dengan demikian di dalam LKPJ LPPD Tahun 2020 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar 48,13%\*\*, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 103,94%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi sangat memuaskan.

#### **B. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang**

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.

Pelaksanaan evaluasi LKPM

Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.

Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.

Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2016 – 2021 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;

Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);

Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;

Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.